



## CIPTAKAN LULUSAN SIAP KERJA SMK Jadi Alternatif Pemegang KMS

**YOGYA (KR)** - Seperti tahun-tahun sebelumnya, kuota siswa miskin atau pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) bagi jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jauh lebih tinggi dibanding jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal itu disesuaikan tingkat capaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebab selama ini lulusan SMP pemegang KMS sebagian besar cenderung melanjutkan ke jenjang SMK.

Ketua Panitia PPDB Kota Yogyakarta 2013 Samiyo mengungkapkan, kuota KMS jenjang SMA diberikan sebanyak 5%. Sedangkan untuk jenjang SMK 25% dari total daya tampung. "Bukan berarti kami menyarankan KMS masuk ke SMK, tetapi selama ini capaiannya seperti itu. Toh, meski SMA diberi kuota 5%, tetapi tidak terisi penuh," ungkap Samiyo di kantornya, Senin (10/6).

Jenjang SMK menjadi alternatif bagi lulusan SMP pemegang KMS, im-

buh Samiyo, lantaran *output* sekolah kejuruan yang siap kerja. Sehingga memicu bagi masyarakat miskin untuk segera mencari pekerjaan guna menopang ekonomi keluarga.

Karena itu, dukungan Dinas Pendidikan bagi siswa miskin yang bersekolah ke SMK juga jauh lebih tinggi dibanding SMA. Hal tersebut dibuktikan dengan alokasi Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) siswa pemegang KMS yang besar. "Makanya, meski di SMK biayanya lebih tinggi karena sering

ada praktik, tetapi siswa miskin tidak akan khawatir. Melalui JPD, biaya itu kami jamin," paparnya.

Besaran JPD pemegang KMS untuk jenjang SMK mencapai Rp 4 juta. Sedangkan jenjang SMA dialokasikan Rp 3 juta/siswa. Meski katrol jaminan cukup tinggi, namun siswa miskin diimbau tidak terlena.

Samiyo menuturkan, jurusan pada jenjang SMK yang akan dipilih harus dipertimbangkan dengan baik. Terutama menyangkut kemampuan calon siswa untuk menjalani jurusan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Kasi Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Wisnu Sanjaya. Berdasar pengalaman tahun lalu, banyak ditemui siswa pemegang

KMS beralih sekolah setelah satu tahun menjalani pembelajaran di sekolah awal yang dipilihnya. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kualitas pembelajaran kepada siswa yang bersangkutan.

Terkait PPDB bagi pemegang KMS, Samiyo mengatakan, diberikan waktu terpisah dibanding reguler. Baik jenjang SMP, SMA maupun SMK, seluruhnya diawali dengan pendataan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Jalan Hayam Wuruk, mulai 18-24 Juni 2013. Pendataan tersebut dengan menyertakan kartu ujian, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), kartu KMS serta Kartu Keluarga. Masing-masing syarat tersebut difotokopi sekaligus dilegalisir oleh pejabat berwenang. **(R-9)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Februari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005